



Mewujudkan Reformasi Tata Kelola Sumber Daya Alam
Secara Menyeluruh Melalui Pelaksanaan

EITI STANDARD

Fabby Tumiwa

Institute for Essential Services Reform

Seminar Pelaksanaan Transparansi Sesuai Standard EITI

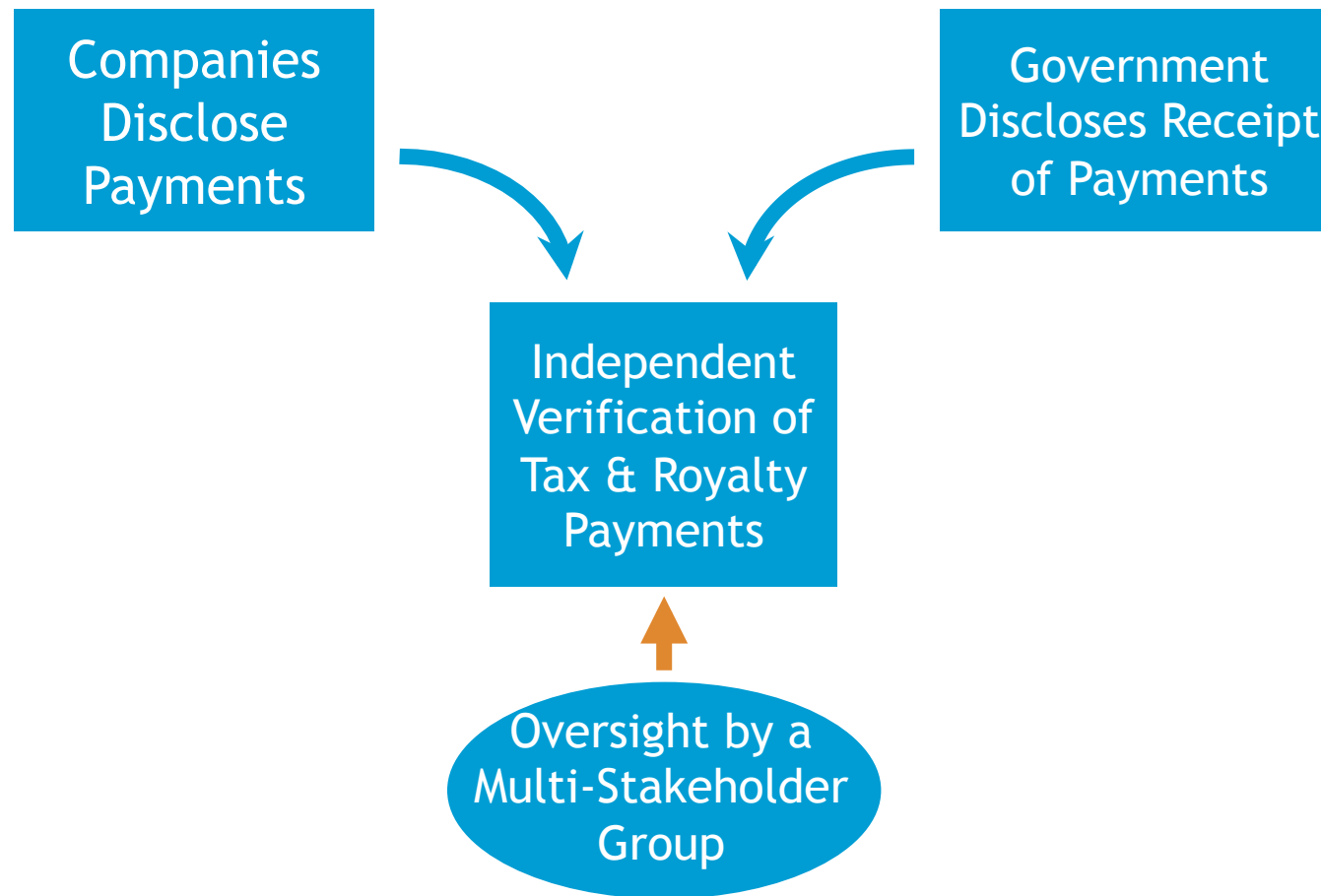
Bandung, 29 Mei 2015

EITI memiliki tujuan jangka panjang yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam

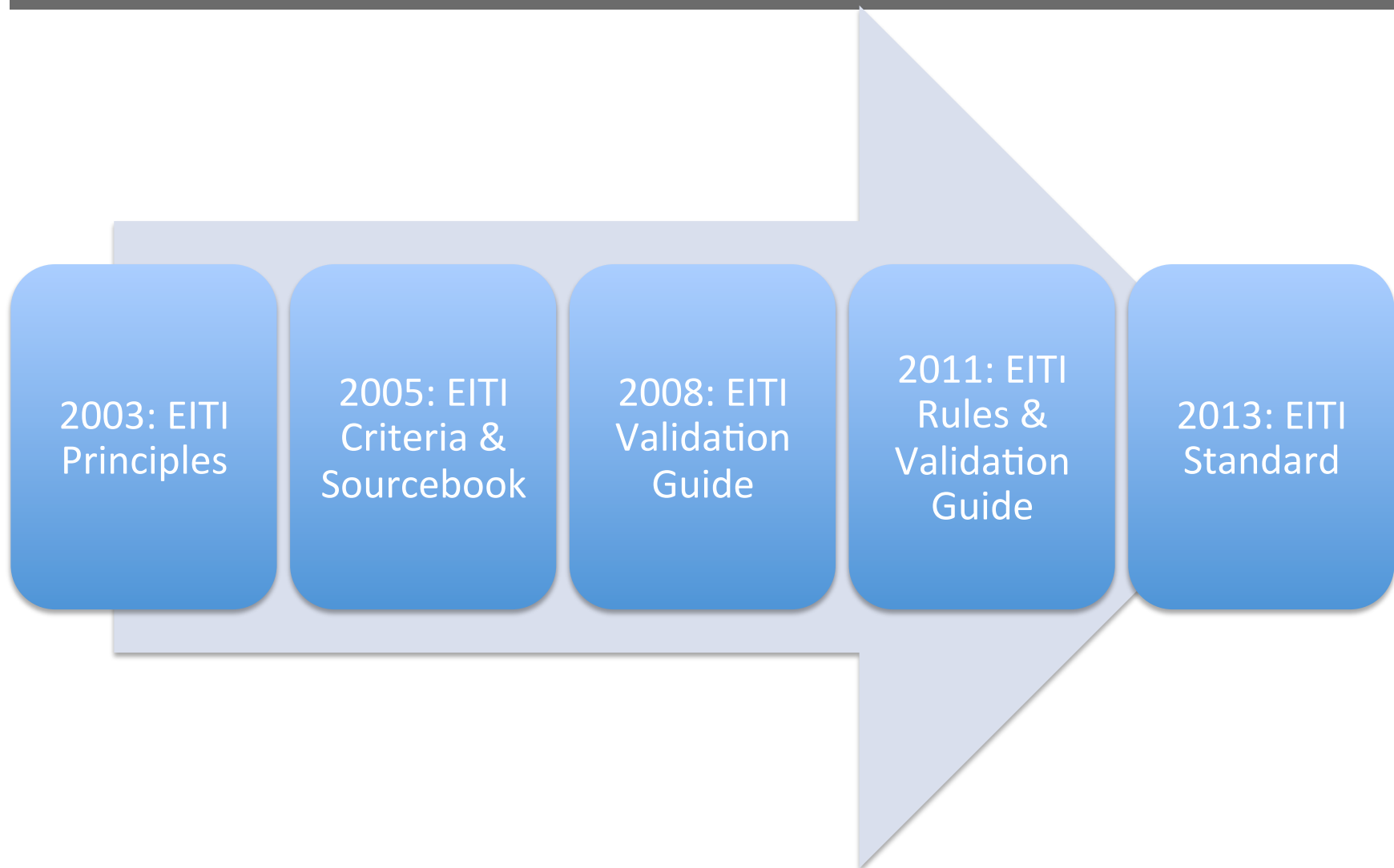
We share a belief that **the prudent use** of natural resource wealth should be an important engine for **sustainable economic growth** that contributes to **sustainable development and poverty reduction**, but if not managed properly, can create negative economic and social impacts (EITI Principle 1)

We recognise that a **public understanding** of government revenues and expenditure over time could help public debate and **inform choice** of appropriate and realistic options for **sustainable development** (EITI Principle 4)

Prinsip kerja dan proses EITI relatif sederhana yang berupa penyampaian laporan pembayaran perusahaan untuk dan penerimaan negara dari industri ekstraktif



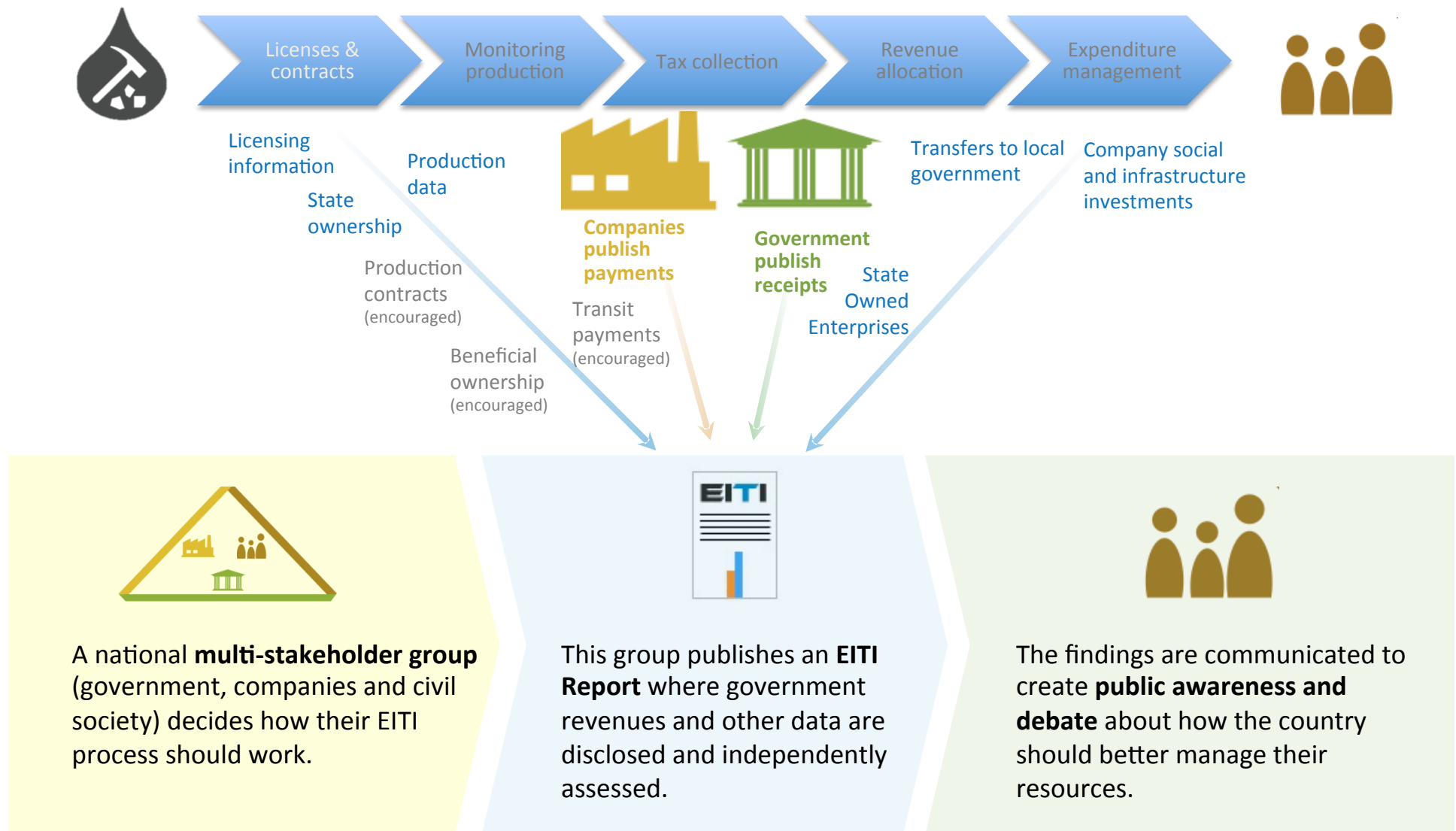
EITI mengalami evolusi, ketentuan dan standard mengalami perubahan untuk membuat EITI mencapai tujuannya dengan lebih baik



Perubahan-perubahan dalam Standard EITI terbaru dimaksudkan untuk memperkuat pelaksanaan dan dampak pelaksanaannya

- Menitikberatkan terhadap kualitas workplan dan manfaat implementasi EITI
- Penyampaian konteks
- Memperkuat laporan EITI
- Memperbaiki proses validasi dan memaksimalkan dampak
- Restrukturisasi dan mengklarifikasi persyaratan (requirement)

Standard EITI yang baru menjamin transparansi dan akuntabilitas yang lebih luas untuk berbagai ranah pada rantai nilai industri ekstraktif



EITI Standard merupakan satu kesatuan dokumen yang menjadi acuan negara yang menerapkan standard ini

Standard	Fungsi
12 Prinsip EITI	Tujuan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan
7 Persyaratan (Requirement)	Ketentuan-ketentuan utama yang harus dipatuhi dalam menerapkan EITI
Panduan Validasi	Panduan bagi Validator dan negara pelaksana EITI terkait proses validasi
Protocol “Partisipasi Masyarakat Sipil”	Ketentuan atas partisipasi dan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses EITI

Persyaratan EITI merupakan ketentuan dan cakupan pelaksanaan Standard yang harus dipatuhi oleh semua negara yang menerapkan EITI

Pengawasan yang efektif oleh Kelompok Pemangku Kepentingan (KPK)

Publikasi laporan EITI yang tepat waktu

Laporan EITI yang berisi informasi yang kontekstual tentang industri ekstraktif

Produksi laporan EITI yang komprehensif

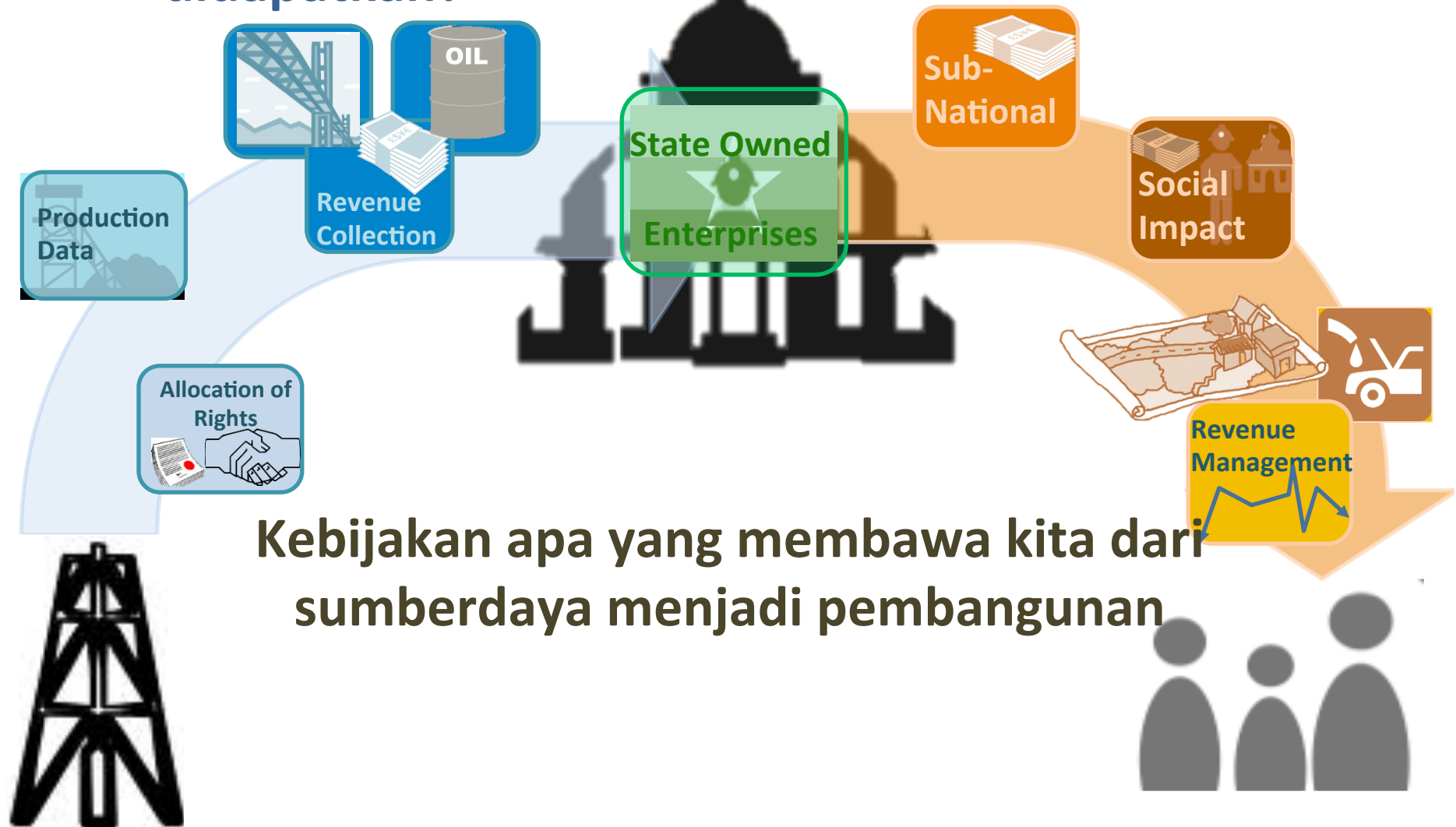
Sebuah proses yang terjamin mutunya sesuai dengan standar internasional

Laporan EITI yang dapat dimengerti, secara aktif mempromosikan, dan berkontribusi pada perdebatan publik

KPK mengambil langkah aksi berdasarkan lesson learned and mengkaji hasil dan dampak dari implementasi EITI

Bagaimana nilai komoditas
didapatkan?

Kemana manfaat pergi?

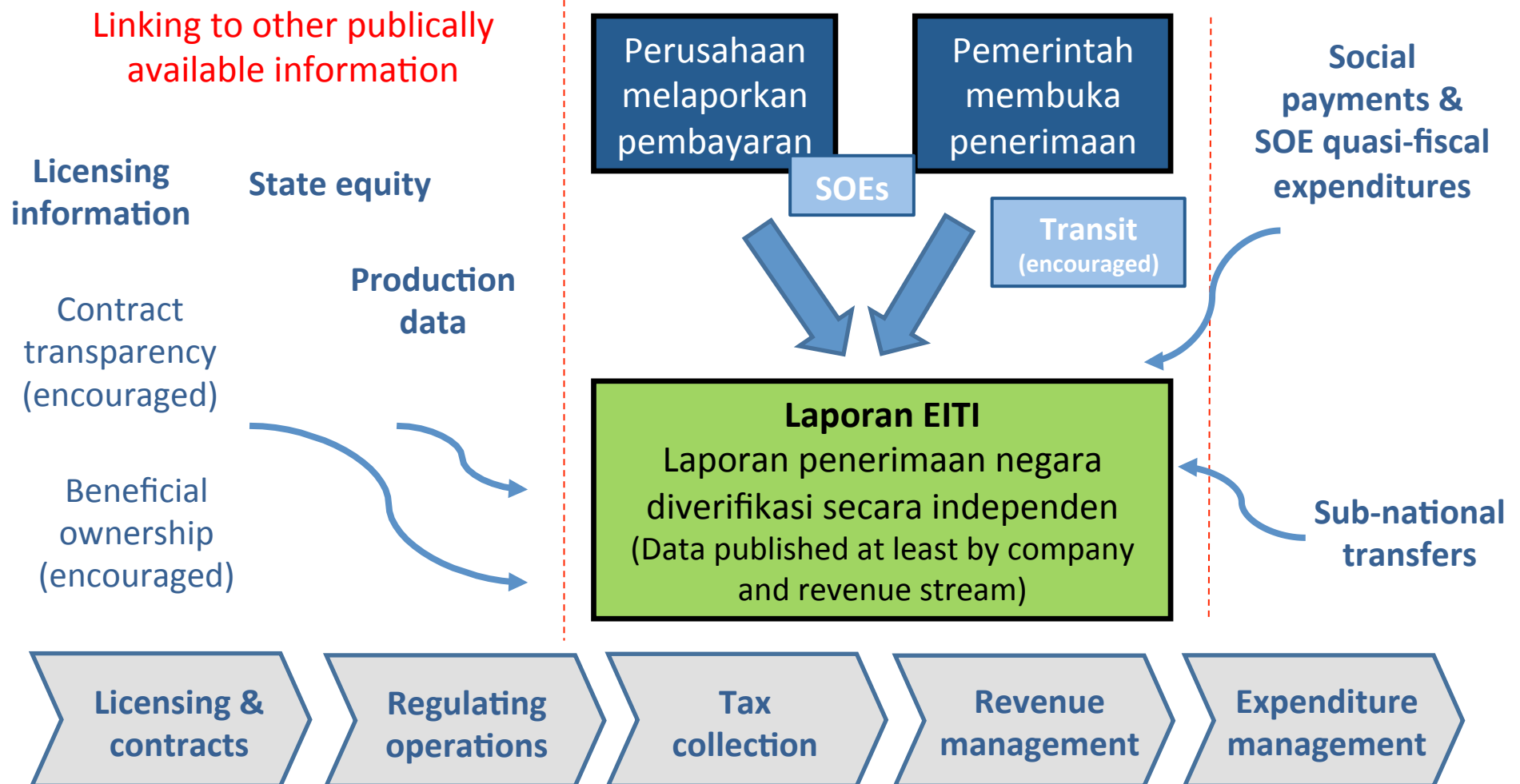


Kebijakan apa yang membawa kita dari
sumberdaya menjadi pembangunan

Apa itu Standard EITI dan bagaimana Standard itu diimplementasikan?

Multi-Stakeholder Group (pemerintah, industri & masyarakat sipil)

Cakupan---> **Laporan EITI** ---> komunikasi ---> perdebatan berbasikan pada informasi



Transparansi dan Akuntabilitas merupakan semangat yang mendasari Standar EITI

- Nilai hasil ekstraksi sumber daya alam yang diterima oleh negara:
 - Alokasi hak pengelolaan (rights)
 - Pengumpulan pendapatan: Data produksi; Landasan hukum, peraturan dan rezim fiskal yang mendasari perhitungan nilai moneter
- Pihak yang menerima kontrak dan isi kontrak
 - Contract disclosure
 - Beneficial ownership
- Penggunaan dan pemanfaatan penerimaan negara dari industri ekstraktif
 - Tenaga kerja
 - Penerimaan yang tercatat dan tidak tercatat dalam anggaran nasional
 - Penerimaan yang dialokasikan khusus (earmarked)
 - Pembayaran sosial
 - Transfer kepada sub-nasional
 - Pengelolaan penerimaan

Nilai
pendapatan
yang diterima
negara dari
seluruh
tahapan
rantai nilai
industri
ekstraktif



Diseminasi
informasi,
Manfaat dari
industri
ekstraktif,
Dampak
pelaksanaan
EITI

Gap Assessment Laporan EITI Indonesia

- Kajian dilakukan untuk Laporan EITI Indonesia 2010-2011 untuk menemukan item apa saja yang perlu diperbaiki untuk dapat memenuhi Standar EITI

SUMMARY TABLE

	Required disclosures not yet made	Encouraged disclosures not yet made
ALLOCATION OF RIGHTS	65%	80%
PRODUCTION	58%	
REVENUES	18%	67%
STATE-OWNED	50%	
SUB-NATIONAL PAYMENTS	33%	50%
SOCIAL IMPACT	100%	100%
REVENUE MANAGEMENT	0%	83%
OTHER	0%	36%

Penutup

- EITI telah mengalami evolusi untuk menjadi sebuah standar internasional dalam hal transparansi penerimaan dari industri ekstraktif dan pengelolaannya.
- EITI Standard (2013) lebih luas dan lebih ketat dibandingkan dengan EITI Rules (2011). Untuk dapat compliance dengan standard yang baru, Indonesia perlu memperbaiki: proses penyusunan laporan (MSG, Workplan, dsb) dan kualitas informasi yang disampaikan, dan diseminasi informasi.
- EITI telah berkembang pesat dan semakin relevan dalam konteks resource governance. Lebih banyak negara, termasuk negara maju, menjadi anggota dan mengimplementasikan EITI.
- EITI dapat menjadi instrumen atau alat analisa untuk memperbaiki tata kelola industri ekstraktif di Indonesia jika dilakukan analisa lanjutan terhadap hasil rekomendasi laporan EITI.

fabby@iesr.or.id | www.iesr.or.id

TERIMA KASIH